

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Turki adalah negara di dua benua, dengan luas wilayah sekitar 814.578 km², 97% (790.200 km²) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km²) terletak di benua Eropa¹. Ada yang menduga bangsa Hittiti yang menjadi penduduk pertama di kawasan ini² berasal dari Eropa. Dugaan yang lebih populer memperkirakan orang Hittiti berasal dari Asia Tengah. Namun demikian, dalam banyak hal Turki lebih berkiblat ke Barat dibandingkan mengadaptasi sosio-politik dan kebudayaan Timur dan Asia. Memasuki tahun pertama masehi, wilayah Turki yang saat itu bernama kerajaan Bizantium memang dikuasai Romawi selama empat abad. Kekuasaan Romawi dijatuhkan kaum Barbar. Pada masa inilah ibukota kerajaan dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel (sekarang Istanbul). Pada abad ke 12, Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Ottoman yang dipimpin raja Osman I. Pada masa inilah pemerintahan Turki Ottoman memperoleh pengaruh Islam yang kuat. Bahkan sepeninggalan Khulafaur Rasyiddin, Turki menjadi Khilafah Islamiyah di bawah dinasti Utsmaniyah. Wilayahnya meliputi jazirah Arab, Balkan, Hongaria hingga kawasan Afrika Utara. Namun kekhalifahan itu hancur akibat perebutan kekuasaan di dalam yang melibatkan intervensi sejumlah

¹ Artikel Ade Solehat. *Kemalisme, Budaya dan Negara* dalam Website Ilmu Budaya UI

² Erik J. Zürcher. (2003) *Sejarah Modern Turki*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. 264

negara asing. Bermula dari perlawanan terhadap campur tangan asing yang dipimpin Musthofa Kemal Attaturk, aksi perjuangan berubah menjadi penentangan terhadap kekuasaan Khalifah. Moment kehancuran Khilafah Islamiyah sendiri terjadi saat rakyat Turki melalui wakil-wakilnya mengeluarkan Piagam Nasional (Al Mitsaq Al Wathoni). Sejak itu, Turki menjadi sebuah negara tersendiri, terpisah dari wilayah-wilayah yang dulu merupakan kesatuan Khilafah Islamiyah.

Menurut pandangan konstitusional, konferensi tersebut bersamaan dengan masa transisi. Pada tahun 1923 keputusan-keputusan dasar dibuat. Pada tanggal 29 Oktober Majelis Nasional Agung mengumumkan Turki sebagai suatu negara republik dan presidennya yang pertama ialah Musthofa Kemal Pasha. Segera terlihat walaupun fungsi khalifah hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat seremonial, lembaga ini tidak sesuai dengan jiwa dan semangat pembaruan direpublik baru ini. Maka pada tanggal 3 Maret 1924 hubungan negara zaman lalu dihapuskan dan majelis secara resmi mengakhiri kehalifahan. Dengan diam-diam khalifah mengundurkan diri keluar negeri, dan hukum pun disahkan untuk membuang semua anggota dinasti ustmaniyah (ottoman) dari tanah Turki³.

Segera setelah itu tanggal 20 April 1924, majelis memberlakukan konstitusi yang secara umum meniru pola-pola negara Eropa Barat. Dinyatakan bahwa Majelis Nasional Agung memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif yang kelak dijalankan oleh presiden republik dan dewan menteri. Prinsip pertanggungjawaban kabinet terhadap parlemenpun ditetapkan. Kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh tiga

³Asgar Bixby (1992). Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia. Sinar Baru Algesindo Bandung. hal 78

badan peradilan yang masing-masing tidak terikat. Hak memilih ditetapkan atas dasar tidak tuna aksara. Anggota majelis ditetapkan masa jabatannya selama empat tahun dimana presiden diangkat oleh majelis ini. Konstitusi menegaskan “hak-hak umum bagi warga negara Turki”, yakni menekankan kebebasan dan hak-hak warga negara seperti terjadi di Barat. Pada intinya semua itu menjunjung tinggi kebebasan individu, hak istimewa (abolisi) bagi individu dan kelompok, kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, berfikir, berbicara, dan kebebasan pers, hak memperoleh pekerjaan, hak kepemilikan pribadi dan organisasi, bebas dari tuduhan arbitrase, larangan penganiayaan dan kerja paksa, penghormatan permukiman pribadi, tidak ada penyensoran surat, wajib belajar dan bebas bea bagi sekolah dasar, dan bebas dari diskriminasi agama dan golongan⁴.

Dengan demikian isi konstitusi itu merupakan kerangka hukum bagi negara Turki baru. Ini adalah karakteristik kecenderungan Turki baru bahwa konstitusinya meniru pola demokrasi Barat. Namun, bukan yang tertulis, melainkan jiwanya yang benar-benar diperhitungkan. Ini merupakan ciri khas bangsa-bangsa abad kedua puluh yang memperagakan konstitusi modern, menunjukkan mesin demokrasi yang tersusun rapi, dan berisi hak-hak asasi manusia yang sebenarnya tidak mencerminkan kehidupan nyata bangsanya. Dengan alasan tersebut, konstitusi Turki, seperti juga konstitusi-konstitusi lainnya, tidak dapat melakukan perubahan di negaranya semata-mata dari apa yang tercantum secara resmi. Juga orang yang rasional tak mungkin

⁴ *Ibid hal 79*

mengharapkan diberlakukannya demokrasi Barat yang benar kepada negeri yang selama berabad-abad tidak mengenal kekuasaan yang lain kecuali kekuasaan absolut.

Tidak dapat disangkal bahwa Turki, di bawah Kemal mengalami perubahan radikal, bahkan dengan perubahan *revolutioner* dari orde lama ke orde baru. Hal yang paling menonjol dari *revolusi* Turki ini adalah bahwa sebagian besar, meski secara bertahap, sesuai dengan tujuannya. Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat.

Perubahan dari imperium Ustmaniayah menjadi negara republik menurunkan Turki dari negara besar menjadi negara kecil. Akan tetapi, itu hanyalah perwujudan luar sebab pada kenyataannya imperium Ustmaniayah telah melemah dan tercabik-cabik, sedangkan Turki Kemal yang lahir kembali itu merupakan suatu organ politik yang homogen, terpadu, dan relatif kuat. Kendatipun demikian, Turki baru sebagai negara kecil dengan penduduk waktu itu sekitar enam belas juta orang harus bertentangan dengan raksasa Uni Soviet yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta dan terbuka terhadap pengaruh kekuatan angkatan lautnya di Mediterania. Jadi, bagaimanapun sempurnanya aparat militer dan politik Turki waktu itu, kekuatannya jelas terbatas⁵.

Pemerintahan Kemal dan para pengikutnya terpuji karena begitu sadar akan keterbatasannya sehingga kebijakan luar negerinya pun disesuaikan dengan keadaan tersebut. Tidak ada petualangan dalam politik luar negerinya kecuali -tentu saja-

⁵ *Ibid hal 79*

selama masa antara penduduknya disamsung dan perjanjian *Lausanne* selama masa singkat itu ia dan beberapa kawan seperjuangannya dapat mencapai tujuan yang menurut akal sehat tidak mungkin tercapai. Mereka, para rasionalis, lalu menantang kekuasaan *entente* yang sedang berjaya dan segera berhasil memerangi beberapa musuh yang kuat. Walaupun hal itu dikatakan sebagai sikap romantik, harus diingat bahwa yang dipertaruhkan oleh Kemal dan kawan-kawannya hanyalah jiwa mereka. Perjanjian *Sevres* praktis telah menjatuhkan status Turki menjadi jajahan bangsa Barat sehingga susah untuk memahami perlakuan yang lebih buruk bagi negara yang dikalahkan. Pemerintah demokrat Turki melanjutkan politik luar negerinya seperti para pendahulunya. Politik ini bermaksud mempererat hubungan dengan Barat dan meningkatkan posisi militer dan strategi dengan Israel. Sesuai dengan tujuan ini pula Turki harus menggalang hubungan baik dengan tetangganya dikawasan Balkan dan Timur Tengah⁶.

Dalam diplomasi Timur Tengah hubungan Turki dengan Israel akan dipisahkan dari hubungannya dengan Dunia Arab. Meskipun Turki menentang pembagian wilayah Palestina, akan tetapi tidak pernah menunjukkan permusuhan dengan negara Israel. Bahkan ia merupakan negara pertama di Timur Tengah yang memberikan pengakuan diplomatik kepada negara Yahudi tersebut. Pertimbangan agama tidak merusak hubungan persahabatan pada umumnya karena Turki sendiri mempunyai kebijakan sekuler. Bahkan memiliki beberapa kesamaan dengan Israel. Perbedaan utamanya ialah bahwa Turki dengan tegas berada di pihak dunia bebas

⁶ *Ibid hal 86*

dalam persaingan Timur Barat, sementara Israel masih hati-hati menentukan sikapnya untuk memilih salah satu dari dua blok tersebut⁷. Hubungan Turki-Israel diresmikan maret 1949⁸, ketika Turki menjadi satu negara mayoritas Islam (sebelum Iran pada tahun 1950⁹). Kerjasama diplomatik antara Turki dan Israel diberi prioritas tinggi oleh pemerintah kedua negara, yang berbagi keprihatinan sehubungan dengan ketidakstabilan regional di Timur Tengah. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut diantaranya adalah dalam bidang militer dan bidang ekonomi.

Hubungan diplomatik dalam bidang militer antara Turki dengan Israel dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama secara melembaga pada tahun 1996 yang dilakukan dalam bentuk pembuatan pesawat, persenjataan dan rudal, dan persiapan kunjungan militer, pengiriman pengamat untuk mengawasi latihan militer serta pertukaran staf dan militer diantara kedua negara tersebut. Israel merupakan negara pemasok utama senjata terbesar ke Turki, dan perusahaan Israel telah bertanggung jawab untuk memodernisasi armada F-4 angkatan udara Turki. Selain itu, perjanjian kerjasama mereka juga dilakukan bentuk-bentuk wilayah seperti: udara, laut, tanah, dan intelijen.

Disamping kerjasama dalam bidang militer, Turki dan Israel juga melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi berupa kerjasama dalam bidang pariwisata dan sumber-sumber alam seperti air, garmen, dan listrik, gas alam dan minyak bumi serta

⁷Asgar Bixby (1992). *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Sinar Baru Algesindo Bandung. hal 257.

⁸Abadi, Jacob (2004). *Israel untuk pengakuan dan penerimaan di Asia: garnisun negara diplomasi*. Routledge. hal 6.

⁹ Ibid hal 37.

manufaktur lainnya. Perdagangan antara kedua belah pihak bernilai lebih dari 3 miliar dolar pertahun dan puluhan perusahaan Turki dan Israel memiliki usaha patungan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan Turki-israel sangatlah dekat, menimbang kerjasama antara kedua negara tersebut diprioritaskan dalam bidang keamanan. Israel memelihara dua misi diplomatik di Turki: kedutaannya terletak di ibukota Turki, Ankara, serta konsulat jenderal terletak di kota terbesar Turki, Istanbul.

Selain melakukan hubungan bilateral dan hubungan diplomatik lainnya yang bersifat politis, Turki juga terlibat langsung dalam bidang-bidang kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dari peran Turki terhadap aksi kemanusiaan di beberapa negara, seperti di Indonesia, di Afganistan, di Gaza serta peran Turki terhadap aksi kemanusiaan Mavi Marmara dimana Turki menjadi tuan rumah dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Mavi Marmara sendiri adalah kapal penumpang sejenis ferry yang dibeli oleh lembaga amal Turki dengan uang dari para donatur dengan kapasitas penuh 800 orang, namun dengan pertimbangan kenyamanan, pihak IHH membatasi jumlah penumpang dalam misi menembus blokade ini hanya 600-an penumpang¹⁰. Kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Antalya, Turki, Kamis malam waktu setempat, untuk bergabung dengan enam kapal lainnya di Laut Tengah. Beberapa kapal kemudian akan beriringan menembus blokade Israel menuju perairan sekitar jalur

¹⁰Ferry Nur,(2010).*Mavi Marmara Menembus Gaza, Kesaksian Seorang Relawan*. Gema Insani. Jakarta. hal. 53.

Gaza yang bisa ditempuh selama 15-20 jam. Pihak IHH (Insan Hak ve Hurriyetleri İnsani Yardım Vakfı) sengaja memberangkatkan Mavi Marmara di malam hari dengan harapan akan memasuki perairan Gaza sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Dalam kapal tersebut terdiri dari anggota parlemen dari beberapa negara, artis dan seniman, dan tentunya para aktivis yang bertentangan dengan kebijakan Israel memblokade Gaza¹¹.

Pihak Israel sendiri dikabarkan telah menyiapkan angkatan lautnya untuk menggiring kapal-kapal ini menuju Ashdod, sebuah kota pelabuhan kecil di utara Jalur Gaza. Israel akan memaksa rombongan membongkar muatan berupa bantuan itu untuk di antar masuk ke Jalur Gaza, namun IHH menyangsikan kebenaran janji Israel itu¹². Kapten Turki yang berada dalam kapal Mavi Marmara, kapal misi bantuan untuk penduduk Gaza yang diserang Israel secara brutal dan menewaskan sedikitnya sembilan orang. Kapten Huseyin Tokalak mengatakan bahwa angkatan laut Israel mengancam akan menenggelamkan kapal sebelum akhirnya tentara mereka memasuki kapal¹³, Tentara zionis Israel menyerang kapal tersebut saat masih berada di wilayah perairan internasional, sekitar 150 km dari pantai Gaza. Meskipun kapten Tokalak telah meyakinkan angkatan laut Israel bahwa mereka masih berada di perairan internasional dan membawa barang-barang yang tidak illegal¹⁴.

¹¹<http://korananakindonesia.wordpress.com/2010/06/01/video-serangan-kapal-mavi-mamara-israel-tak-berperikemanusiaan-serang-bantuan-kemanusiaan>.

¹²Ibid .

¹³Ferry Nur, (2010). *Mavi Marmara Menembus Gaza, Kesaksian Seorang Relawan*. Gema Insani. Jakarta. hal. 24.

¹⁴Ibid.

Karena alasan inilah yang melatar belakangi penulis menulis skripsi dengan Judul “*Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Israel dalam kasus Penyerangan Kapal Mavi Marmara*”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjembatani hubungan diplomatik dua negara apabila ada gejolak konflik.
2. Penelitian ini diharapkan juga untuk mengetahui posisi Turki terhadap hubungan diplomatiknya dengan Israel yang telah dijalin sejak lama, pasca penyerangan pasukan Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara.
3. Dengan kasus tersebut diharapkan juga menjadi contoh terhadap negara-negara Dunia Islam khususnya yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara non Islam.
4. Sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima dibangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
5. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S-1) pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan ulasan yang dikemukakan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana kebijakan pemerintah Turki terhadap Israel dalam kasus penyerangan kapal Mavi Marmara?.”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab fenomena tersebut penulis menggunakan konsep pemikiran sebagai ujung tombak bagi unit analisa ini. Konsep sendiri di artikan sebagai salah satu simbol paling penting dalam bahasa. Menurut *mochtar masoed* konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Sehingga konsep sebenarnya merupakan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan atau fenomena tertentu. Ia bukan sesuatu yang asing, kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita¹⁵.

Dari definisi konsep di atas, maka untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis menggunakan kerangka dasar pemikiran sebagai acuan yang akan digunakan yaitu:

¹⁵Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 93-94.

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Sebagai mana yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

*“Foreign policy is a strategy of planned course of action developed by decision makers between state vis-a-vis, other state or international entities aimed at achieving specific goals defined international interest”*¹⁶.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kebijakan luar negeri adalah suatu strategi dan rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional, dalam menganalisa pengambilan keputusan kebijakan luar negeri¹⁷.

Politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sasaran secara rasional. Politik luar negeri adalah hasil proses interaksi, penyesuaian diri dari perpolitikan di antara permainan tawar-menawar (*bargaining games*) diantara pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, politik luar negeri adalah proses sosial bukan proses intelektual¹⁸.

¹⁶Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*. Holt Rinehart Winston INC, Western Michigan University New York, 1973, hal. 127.

¹⁷ Jack C. Plano, *Kamus Hubungan Internasional*, Di Terjemahkan oleh Drs. Wawan Juanda, Putra A Bardin. 1999. hal 5

¹⁸Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta. 1990. hal. 236.

Evan Luard, dalam tulisannya tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Luar Negeri (1981) menyebutkan beberapa tipe tindakan utama yang dapat diambil oleh suatu negara guna mempengaruhi negara lain antara lain:

- a. Protes yang bersifat rahasia kepada pemerintah yang bersangkutan.
- b. Protes bersama yang dibuat dengan pemerintah-pemerintah lain.
- c. Pernyataan keprihatinan yang terbuka dalam parlemen atau ditempat lain.
- d. Dukungan dari pembicaraan-pembicaraan dalam badan-badan seperti komisi PBB mengenai hak-hak asasi manusia untuk penyelidikan situasi.
- e. Dimulainya segera tindakan demikian dalam badan-badan internasional.
- f. Pembuatan atau penundaan kunjungan tingkat menteri.
- g. Pengekangan kontak-kontak budaya dan olahraga.
- h. Embargo penjualan senjata.
- i. Pengurangan program bantuan.
- j. Penarikan duta besar.
- k. Penghentian semua bantuan.
- l. Pemutusan hubungan diplomatik.
- m. Sangsi-sangsi perdagangan¹⁹.

Teknik-teknik politik luar negeri²⁰ di atas juga diantaranya telah dijalankan Turki yang digunakan untuk menekan Israel dalam menyelesaikan kasus penyerangan

¹⁹Sukawarsani Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2008. hal 86.

²⁰Dikutip dari Skripsi *Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Denmark dalam Kasus Pemuatan Karikatur Nabi Muhammad SAW oleh Harian Umum Denmark, Jyllands Posten*. Oleh Fahiroh.

bantuan kemanusiaan Mavi Marmara yang di lakukan oleh tentara Israel. Beberapa teknik politik luar negeri yang di gunakan antara lain adalah: mengirim note protes kepada pemerintah negara yang bersangkutan, penarikan duta besar, dan lain-lain. hal ini akan penulis ungkapkan lebih jauh lagi pada bab selanjutnya.

Perumusan tujuan politik luar negeri yang diinginkan dan pelaksanaannya yang tepat banyak tergantung pada kekuatan yang dimiliki adalah kenyataan bahwa kekuatan nasional setiap bangsa itu terbatas, baik negara kecil maupun besar. Oleh karenanya perumusan politik luar negeri yang realistis tergantung pada taksiran cadangan kekuatan dan sumber daya lain yang tersedia.

Ivo D. Duchacek mengakui pentingnya faktor-faktor ini dalam perumusan politik luar negeri. Oleh karenanya, menurutnya tugas utama politik luar negeri biasanya didefinisikan sebagai proses penilaian berkesinambungan dari kemampuan dan kehendak diri sendiri dan suatu bangsa, ini berarti:

1. Menentukan tujuan diri seseorang dengan memandang kekuatan diri sendiri dan sekutunya, yang benar-benar ada dan potensial bagi pencapaian tujuan-tujuan ini.
2. Menilai tajam bangsa-bangsa lain yang tak bersahabat netral maupun yang bersahabat serta kapasitas mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut sekarang ini.

Kesalahan didalam salah satu atau kedua proses ini bisa membawa kepada bencana. Perang bisa muncul karena kekuatan lawan dianggap rendah atau terlalu

tinggi menilai kekuatan sendiri. Beberapa perang bisa dihindarkan, atau dilakukan dengan kerugian yang lebih sedikit karena perkiraan atas bangsa lain tidak terjadi.

Telah terbukti bahwa kesalahan dalam menilai kekuatan atau kelemahan, tujuan, aspirasi bangsa lain, dan sebagainya bisa membawa kepada kesalahan yang besar dalam membentuk kerangka politik luar negeri suatu bangsa. Kesalahan dalam penilaian ini hanya bisa dihindarkan dengan pertolongan diplomasi. Unsur-unsur diplomatik bisa memperoleh penilaian kekuatan, kelemahan, dan aspirasi bangsa lain dengan mengumpulkan informasi tentang hal-hal ini. Sesudah hal-hal ini dengan semestinya, mereka bisa memberitahu kantor departemen luar negeri, yang kemudian merumuskan politik luar negeri yang efektif yang didasarkan pada informasi yang diterima. Dengan demikian dalam perumusan yang tepat suatu politik luar negeri, diplomasi mempunyai peranan penting untuk dimainkan.

Politik luar negeri dalam aspeknya yang dinamis adalah sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau suatu negara terhadap negara lain. Ia termasuk jumlah keseluruhan hubungan luar negeri suatu bangsa dan bentuk tujuan dan kepentingan terbarunya. Penyusunan politik luar negeri mungkin merupakan fungsi politik paling tinggi dari suatu negara. Kesalahan dalam perumusannya bisa membawa ke akibat yang paling serius. Karena pentingnya, perumusan politik luar negeri telah menjadi hak prerogatif pimpinan eksekutif suatu negara sepanjang waktu²¹. Hal ini bisa dilihat dari proses apa yang dilakukan oleh

²¹S. L. Roy, *Diplomasi*, Diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta 1995, hal. 31-33.

negara Turki, yaitu Turki melakukan protes terhadap negara yang bersangkutan yakni negara Israel diminta untuk melakukan permohonan maaf akibat penyerangan yang dilakukan oleh para tentara Israel ke kapal Mavi Marmara. Selain itu negara Turki melakukan protes bersama beberapa negara lain dengan mengirim perwakilan pengacara mereka untuk melakukan protes kepada pengadilan internasional. Begitu pula diplomatik pasca Mavi Marmara antara Turki dengan Israel dimana Turki kemudian menarik duta besarnya yang ada di Israel. Tentunya dengan penarikan duta besar tersebut akan mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara terutama kebijakan politik luar negeri kedua negara tersebut.

Dengan berdasarkan teori diatas, maka penulis akan mengamati sejauh mana kebijakan pemerintah Turki terhadap Israel dalam kasus penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara.

E. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Turki terhadap Israel dalam kasus penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara yaitu:

1. Pengiriman note protes atas penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap kapal Mavi Marmara dan Israel diminta untuk melakukan permohonan maaf atas kasus tersebut.

2. Melakukan protes bersama yang dibuat dengan pemerintah-pemerintah lain.
3. Penarikan duta besar Turki dari Israel untuk sementara hingga situasi di dalam negeri kembali tenang.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang yang berawal dari minat untuk mengetahui fenomena-fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode yang sesuai dan seterusnya²². Hal yang sangat penting bagi peneliti adalah adanya minat untuk meneliti masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Minat tersebut dapat berkembang melalui bacaan, diskusi, seminar, atau pengamatan, atau bahkan gabungan dari hal-hal tersebut. Titik tolak yang sesungguhnya bukanlah metode penelitian, akan tetapi kepekaan dan minat, ditopang oleh akal sehat (*common sense*)²³. Berbagai tahap harus ditempuh untuk tercapai hasil penelitian yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, dan masing-masing tahapan perlu dilakukan secara kritis, cermat dan sistematis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library reseach* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-

²²Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Surai*. Jakarta, LP3ES, hal. 12.

²³Ibid.

sumber lain yang memiliki relevansi yang akan menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah. Sedangkan metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah metode *deskriptif* dan *argumentative*. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji tentang hubungan diplomatik Turki dan Israel terutama pasca penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara.

Batasan penelitian yang dimaksud disini adalah penulis akan membahas hubungan diplomatik Turki dan Israel pasca penyerangan kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara oleh tentara Israel hingga akhir 2010.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan dari penulisan skripsi ini yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang dinamika hubungan Turki dan Israel, sejarah hubungan diplomatik, kerjasama dibidang militer, kerjasama dibidang ekonomi.

Bab ketiga, menjelaskan tentang dinamika serta peranan keterlibatan Turki dalam aksi kemanusiaan, dan makna tragedi Mavi Marmara bagi Turki.

Bab keempat, menjelaskan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki terhadap Israel atas kasus penyerangan yang dilakukan tentara Israel terhadap kapal Mavi Marmara.

Bab kelima, berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi ini.